

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sampah atau limbah merupakan salah satu ruang lingkup yang harus ditangani dengan tepat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (UNDP,2007). Penduduk merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas terbatas (Ningrum, 2012). Menurut Saptutyingsih (2007), Sumber utama pencemaran di perkotaan adalah limbah manusia, limbah padat, dan emisi kendaraan bermotor. Dampak dari meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan akan membuat kegiatan perekonomian menjadi meningkat, hal tersebut akan memicu menurunnya kondisi lingkungan perkotaan, seperti meningkatnya volume sampah yang dihasilkan.

Permasalahan lingkungan menjadi permasalahan yang tidak terpisah dari agama, dengan berbagai jenis kerusakan. Pengembalian alam sebagai bagian dari kelangsungan hidup manusia di bumi, karena manusia sangat berperan penting bagi kelangsungan hidup lingkungan. Dari sudut pandang agama, manusia telah ditetapkan

oleh Al-Qur'an sebagai khalifah di bumi seperti yang tertera pada surah Al-A'raf (7) :

56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ -٥٦

Artinya :

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Penggalan surat diatas merupakan tafsir dari KEMENAG (Kementrian Agama) Indonesia yang isinya adalah Allah SWT melarang kita manusia membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan yang dimaksud merupakan kerusakan yang mencakup dalam semua bidang, seperti merusak jasmani dan rohani orang lain, merusak dalam pergaulan, merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Allah telah menciptakan bumi dengan segala kelengkapannya yang semuanya ditujukan untuk keperluan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Menurut Hadiwiyoto (1983), jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, penyediaan kebutuhan penduduk, pola konsumsi masyarakat, serta iklim dan musim merupakan faktor yang menentukan jumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu kota. Keberadaan sampah merupakan permasalahan yang sulit dalam menanganinya terlebih di daerah perkotaan yang notabennya memiliki potensi produksi sampah yang sangat besar, oleh karena itu perlu ditangani secara cepat dan tepat tanpa menimbulkan permasalahan yang baru. Intensitas sampah yang besar

dapat memicu permasalahan baru yaitu terbatasnya lahan penampung dan pembuangan sampah. Salah satu provinsi di Indonesia dengan tujuan wisata dan pendidikan yang sering didatangi oleh penduduk Indonesia adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tercatat jumlah penduduk DIY terus meningkat pada tahun 2018 sebesar 3.802.872 jiwa sampai pada tahun 2020 telah mencapai 3.882.288 jiwa (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta (Jiwa)
2018	3.802.872
2019	3.842.932
2020	3.882.288

Sumber : BPS DIY (2020)

Hal tersebut menjadi penyebab utama adanya permasalahan sampah di Provinsi DIY karena terjadinya peningkatan penduduk di setiap tahunnya. Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang serius dan butuh perhatian yang khusus, dikarenakan pertumbuhan penduduk meningkat tiap tahunnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari peningkatan jumlah penduduk tersebut, volume sampah akan meningkat dan akan melebihi batas daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tercatat volume sampah di Provinsi DIY terus meningkat dari tahun 2016 sebesar 644,16 ton/hari sampai pada tahun 2020 telah mencapai 1.451,00 ton/hari (Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Volume sampah dan persentase penanganan sampah di Provinsi  
DIY tahun 2016-2020

Tahun	Volume sampah (ton/m3)	Penanganan Sampah (ton/m3)
2016	644,16	422,14
2017	659,69	549,74
2018	644,69	583,80
2019	644,69	583,80
2020	1.451,00	772,72

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2020)

Menurut Budihadjo (2006) meningkatnya volume sampah di TPA disebabkan lahan penampung atau pembuangan sampah yang dijadikan TPA sudah tidak bisa menampung kapasitas sampah yang ada dan pengelolaan sampah yang tidak tepat pada TPA tersebut. Dampak lingkungan merupakan salah satu bentuk dari eksternalitas yang merugikan. Secara umum eksternalitas merupakan suatu efek samping dari aktivitas pihak tertentu terhadap pihak lain yang dapat menguntungkan maupun merugikan. Eksternalitas mengakibatkan alokasi sumber daya tidak efisien sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk mengambil kebijakan.

Salah satu bentuk eksternalitas negatif dari setiap aktivitas kehidupan manusia adalah masalah sampah. Sampah adalah bahan buangan sebagai akibat dari aktivitas manusia yang merupakan bahan yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi (Hadiwiyoto, 1983). Ini berkaitan dengan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah terbatas, apabila terus meningkatnya volume kegiatan penduduk perkotaan.

Kondisi tersebut akan semakin memburuk jika pengelolaan sampah di masing-masing daerah masih kurang efektif, efisien dan berwawasan mengenai lingkungan. Kabupaten Kulon Progo memiliki pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, menyusul banyaknya masalah sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. TPA milik Kabupaten Kulon Progo yaitu TPA Banyuroto, terletak di Dusun Tawang, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan dengan luas 1,08 Ha.

Tabel 1.3 Volume Sampah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumah penduduk	Timbulan sampah (ton)/ hari
1	Temon	27.203	32.97
2	Wates	48.898	59.27
3	Panjatan	44.888	54.41
4	Galur	23.368	28.32
5	Lendah	39.997	48.48
6	Sentolo	49.320	59.78
7	Pengasih	50.220	60.87
8	Kokap	32.167	38.99
9	Girimulyo	22.760	27.59
10	Nanggulan	29.920	36.27
11	Samigaluh	27.934	33.86
12	Kalibawang	26.436	32.04
Total		423.111	512.85

Sumber: DLH Kulon Progo, 2019

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa produksi sampah di Kabupaten Kulon Progo tiap harinya mencapai 512,85 ton. Sampah yang diolah dari banyaknya produksi sampah tersebut berupa sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik hanya dilakukan pengepresan. Masyarakat disekitar TPA

Banyuroto mulai memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Sejumlah sumur milik warga Dusun Tawang, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan mengalami perubahan warna dan bau tidak sedap setiap kali turun hujan yang pada akhirnya menyebabkan penyakit gatal-gatal, yang di duga akibat limbah yang berasal dari sampah TPA Banyuroto.

Menurut Sunartono (2018) salah satu faktor yang menyebabkan volume sampah yang semakin meningkat ialah masih kurangnya sosialisasi dan pengetahuan pengelolaan sampah terhadap masyarakat sekitar TPA. Proses pembuangan akhir sampah memiliki dua jenis, yakni: *open dumping* (penimbunan secara terbuka) dan *sanitary landfill* (pembuangan secara sehat) (Sidik et. al, 1985). Menurut Puspitaningrum (2019), TPA Banyuroto masih menggunakan sistem *open dumping* dalam pengelolaan sampahnya, hal tersebut yang menyebabkan timbulnya dampak negatif yaitu pencemaran pada lingkungan disekitar TPA. Apabila peningkatan jumlah sampah tidak diiringi dengan pengelolaan sampah yang baik di lokasi TPA maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Menurut kalangan DPRD Kulonprogo Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto dinilai tidak mencukupi untuk menampung berton-ton sampah dalam dua hingga tiga tahun mendatang, oleh karena itu kalangan DPRD Kulonprogo mendesak Pemerintah Kabupaten untuk segera memperluas TPA Banyuroto. Keberadaan TPA Banyuroto menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari keberadaan TPA Banyuroto adalah terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari sampah yang menumpuk di TPA untuk didaur ulang terutama sampah anorganik yang meliputi plastik, kertas, besi dan sebagainya.

Proses pendaur ulang sampah ini melibatkan beberapa pihak antara lain pemulung, pengepul dan pabrik daur ulang. Tujuan dari pemanfaatan daur ulang sampah anorganik ini agar terjadi peningkatan nilai tambah pada setiap pihak yang terlibat dalam rantai nilai dari sampah anorganik. Usaha daur ulang sampah anorganik juga memberikan nilai positif bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama di sekitar TPA karena sampah tersebut menghasilkan nilai ekonomi bagi mereka. Keberadaan TPA Banyuroto juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan pemanfaatan sampah anorganik yang ada di TPA, seperti memilah sampah dan menjualnya kembali. Kegiatan pemanfaatan sampah anorganik untuk didaur ulang dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat merupakan salah satu eksternalitas positif terutama dalam bidang ekonomi.

Dampak negatif dari keberadaan TPA Banyuroto yaitu berupa pencemaran lingkungan baik itu pencemaran air, udara, maupun tanah, serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya. Menurunnya kualitas udara diantaranya adalah bau yang tidak sedap dan meningkatnya intensitas debu akibat aktivitas transportasi pengangkutan sampah. Selain itu saat hujan turun, aliran air dari TPA mengalir ke sebagian pemukiman warga. Kejadian tersebut telah membuat warga merasakan gatal-gatal di sebagian tubuhnya. Kondisi

tersebut tidak dapat dibiarkan, perlu adanya penanganan yang tepat mengenai pengelolaan TPA Banyuroto.

Dampak negatif dari keberadaan TPA Banyuroto tersebut merupakan suatu bentuk eksternalitas negatif. Menurut Fauzi (2006) Eksternalitas negatif merupakan dampak negatif dari suatu kegiatan yang dilakukan suatu pihak dan mempengaruhi pihak lain. Pada kasus pencemaran, Fauzi (2006) mengatakan untuk membuat mekanisme pasar bekerja dengan sempurna maka pelaku penyebab terjadinya pencemaran harus membayar kompensasi terhadap masyarakat yang terkena pencemaran.

Eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari keberadaan TPA Banyuroto seharusnya merupakan tanggungan pihak pengelola, dalam hal ini pemerintah daerah atau pemerintah seharusnya memberikan kompensasi terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak dari keberadaan TPA, menurut ketentuan dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 25 Ayat 1 yang berbunyi “ Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah”. Kompensasi seharusnya diberikan kepada masyarakat sebagai pengganti biaya akibat kerugian yang dideritanya dan untuk menghindari penolakan kasus lingkungan (pencemaran).



Kondisi yang dialami masyarakat tersebut menjadi pemicu untuk dilakukannya penelitian mengenai nilai kesediaan menerima (*willingness to accept*) masyarakat terhadap dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto. Perhitungan besaran biaya eksternalitas dalam bentuk nilai WTA masyarakat terhadap dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto menggunakan pendekatan nilai keberadaan (*Contingent Valuation Method*), hal ini didukung dengan pernyataan Garrod dan Willis (1999) jika individu memiliki hak atas sumber daya, pengukuran yang relevan adalah kesediaan untuk menerima (*Willingness to Accept*) kompensasi yang paling minimum atas hilangnya atau rusaknya sumber daya alam yang dia miliki.

Pada penelitian Saptutyningasih dan Arifatus (2020), variabel pendidikan dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan hubungan dengan kesediaan untuk membayar kesehatan asuransi. Penelitian ini menggunakan metode CVM (Contingent Valuation Method) terhadap 394 responden. Berdasarkan hasil penelitian 64% bersedia membayar asuransi kesehatan karena mereka berisiko terpapar warna hijau penyakit tembakau, sedangkan 36% responden tidak bersedia membayar asuransi kesehatan.

Pada penelitian Saptutyningasih dan Laila (2019), variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan hubungan terhadap kesediaan membayar (*willingness to pay*) untuk peningkatan kualitas pelayanan commuter line (KRL). Penelitian ini menggunakan metode CVM (Contingent Valuation Method) terhadap 267 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata WTP untuk peningkatan kualitas pelayanan KRL adalah Rp 4.500 (USD 0,32). Persentase

pengguna jasa KRL yang bersedia membayar Rp 4.500 untuk perbaikan kualitas pelayanan adalah sebesar 79%. Hal ini menandakan bahwa kesadaran pengguna KRL untuk meningkatkan kualitas pelayanan masih rendah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa nilai *willingness to accept* masyarakat terhadap dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto?
2. Apakah faktor pendapatan mempengaruhi *willingness to accept* terhadap dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto?
3. Apakah faktor tingkat pendidikan mempengaruhi *willingness to accept* terhadap dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto?
4. Apakah faktor Usia mempengaruhi *willingness to accept* terhadap dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto?
5. Apakah faktor jarak rumah mempengaruhi *willingness to accept* terhadap dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto?
6. Apakah persepsi masyarakat terhadap penilaian kondisi air, udara dan lingkungan mempengaruhi *willingness to accept* terhadap dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto?
7. Apakah persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mempengaruhi *willingness to accept* terhadap dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto?

8. Apakah faktor pengetahuan mengenai pengolahan sampah mempengaruhi *willingness to accept* terhadap dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengukur nilai *willingness to accept* terhadap dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto.
2. Menganalisis pengaruh pendapatan terhadap *willingness to accept* dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto.
3. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap *willingness to accept* dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto.
4. Menganalisis pengaruh usia terhadap *willingness to accept* dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto.
5. Menganalisis pengaruh jarak rumah terhadap *willingness to accept* dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto.
6. Menganalisis pengaruh persepsi masyarakat mengenai penilaian kondisi air, udara, dan lingkungan terhadap *willingness to accept* dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto.
7. Menganalisis pengaruh persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah terhadap *willingness to accept* dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto.
8. Menganalisis pengaruh pengetahuan mengenai pengelolaan sampah terhadap *willingness to accept* dampak negatif keberadaan TPA Banyuroto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengelola dan pengambil kebijakan dalam rangka pelestarian lingkungan di sekitar TPA Banyuroto.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat mengenai pentingnya mengetahui kelestarian lingkungan di sekitar sehingga partisipasi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dapat ditingkatkan.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis serta menambah wawasan mengenai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan.